

Skripsi

By nyslul ula

Submission date: 11-May-2023 12:50PM (UTC+0700)

Submission ID: 2090168586

File name: Nyslul_192010300001_Skripsi 1.docx (115.7K)

Word count: 4616

Character count: 32949

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
ABSTRACT	2
Pendahuluan	2
Metode Penelitian	3
Teknik Pengumpulan Data	3
Informan Penelitian	4
Teknik Analisis Data	4
Keabsahan Data	5
Hasil dan Pembahasan	5
Penerapan Transaksi Nontunai di Kecamatan Wilayah Sidoarjo	5
Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan di Kecamatan Wilayah Sidoarjo	5
Penerapan Prinsip <i>Good Governance</i> pada Kecamatan wilayah Sidoarjo	6
Manfaat dan Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Implementasi Non tunai	6
Kesimpulan	7
Daftar Pustaka	8

EVALUASI PENERAPAN TRANSAKSI NON TUNAI PADA PENGELOLAAN KEUANGAN DI KECAMATAN WILAYAH SIDOARJO

Naylul Ula¹ dan Heri Widodo²

^{1,2}Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Email : naylulula000@gmail.com
Email : heriwidodo@umsida.ac.id

ABSTRACT

The implementation of non-cash transactions in state administration is carried out as an effort to prevent and eradicate corruption. The application of this system is expected to realize accountable, transparent, effective and efficient financial management. This study aims to determine the process of implementing non-cash transactions and also to find out the constraints in financial management in implementing the APBD. The method used is interpretive qualitative with a case study approach. The results of this study indicate that the implementation of non-cash transactions in financial management in the subdistricts of the Sidoarjo region has been running smoothly and in accordance with the principles of good governance. Some of the benefits of this non-cash transaction are that information on balances and information on all transaction movements can be traced so that they are more accountable, balances and transactions are visible in the system every day so that they are more transparent. Budget usage is more efficient and cash flows in and out are more controlled. Non-cash transactions tend to be more efficient because they speed up and make it easier for treasurers to report deposits/financial bills and guarantee security and confidentiality.

Keywords: non-cash transactions; financial management

Pendahuluan

Penerapan praktik yang berbeda dengan transaksi pembayaran tunai pada pengelolaan administrasi negara ialah sebuah usaha untuk menambah mutu pengelolaan administrasi secara maksimal, dimana tidak ada praktik korupsi, transparansi, serta akuntabel. Diakhir tahun 2017, Kementerian Dalam Negeri menciptakan SE (surat edaran) Menteri Dalam Negeri Nomor 910/ 1866/SJ Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada 17 April 2017. Penyelenggaraan transaksi tidak memuat melalui pemprov, sebagai konsekuensi dari himbauan arahan presiden untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa pelaksanaan transaksi non tunai di kantor keuangan daerah dilakukan dengan perlahan ditahun 2018, serta cara pengalihan mekanisme daerah otonomnya yang berlandaskan hukum kuat diserahkan ke daerah masing-masing untuk penyelenggaraannya[1][2][3]. Dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) Di Indonesia masih terdapat beberapa hambatan, salah satunya yaitu banyak terjadi kasus korupsi, kolusi dan nepotisme[4]. Dilansir dalam *Indonesia Corruption Watch* (ICW) paling banyak kasus tindakan korupsi pada tahun 2021 sebanyak 154 kasus pada sektor anggaran dana desa dengan potensi kerugian sebesar Rp233 miliar. Korupsi anggaran dana desa bahkan cenderung meningkat sejak 2015 Dari 17 kasus dengan kerugian sebesar Rp40,1 miliar[5][6].

Kemajuan teknologi saat ini juga berpotensi mengubah keadaan sistem pembayaran dalam transaksi ekonomi, memungkinkan pelaporan yang lebih cepat dan penyajian laporan keuangan yang dapat diterima sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Tidak hanya transaksi tunai yang kini lebih sederhana, namun juga transaksi nontunai yang lebih efisien dan ekonomis. Untuk pendapatan dan pengeluaran, digunakan mekanisme transaksi nontunai. Untuk itu perlu dilakukan penelaahan terhadap sistem transaksi nontunai[7][8]. Adapun permasalahan yang terjadi saat menggunakan sistem pembayaran non tunai atas alokasi dana desa dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), salah satunya yaitu dilansir dari kompas.com[9] menyatakan total kerugian negara sebesar Rp 174.638.235 ditemukan oleh tim pengecekan dari ITS dengan menemukan beberapa kejanggalaan dari beberapa pembangunan fisik senilai Rp 79.418.035 dan temuan hasil audit inspektorat dengan kejanggalaan sebesar Rp 95.220.200. Pada tahun 2017, Desa Ngaban mendapatkan anggaran yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), bagi hasil pajak atau retribusi dan DD dari APBN dengan total nilai sebanyak Rp. 1.978.821.121.14 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua puluh satu ribu seratus dua puluh satu empat belas rupiah). cara yang dilakukan oleh mantan kades untuk mendapatkan dana, yakni mencairkan dana sebesar 1.9 miliar itu di Bank Jatim pada 2017. Setelah uang tersebut dicairkan oleh bendahara, ia meminta sejumlah uang yang telah ditarik dan mengambil alih pencairan dari bendahara untuk dikuasai sendiri tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD). Padahal, anggaran tersebut telah ditetapkan sesuai APBDesa tahun 2017.

Pemerintah mulai mendorong penerapan transaksi non tunai dikalangan masyarakat maupun lingkungan pemerintahan dengan diterbitkannya Perbup No. 9 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perbup No. 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembayaran non tunai dalam Anggaran Belanja Daerah yang merupakan upaya untuk

mencegah terjadinya penyelewengan atau korupsi. Dewan Pemerintahan Kab. Sidoarjo yang pelaksanaannya berdasarkan prinsip transaksi non tunai yaitu efisiensi, keamanan, manfaat dan transparansi. Peraturan tersebut berlaku untuk semua perangkat daerah di Kabupaten Sidoarjo. Tidak terkecuali Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Jabon, Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Porong dan Kecamatan Candi, merupakan perangkat daerah dari wilayah pemerintahan Sidoarjo yang juga memiliki kewenangan untuk memimpin perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan pengelolaan keuangan baik yang utama. Dengan diberlakukannya prinsip transaksi bebas bunga berdasarkan Perbup No.9 Tahun 2019, dan mendukung kebijakan pemda untuk pengelolaan keuangannya, diharap beberapa daerah kecamatan tersebut telah menerapkan prinsip transaksi non tunai. Yang ditujukan untuk transaksi belanja APBD (Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah) menurut periode. Setelah itu, transaksi nontunai diterapkan langsung di beberapa kecamatan pada tahun 2019.[10]

Untuk memenuhi perintah gubernur mengenai pelaksanaan pembayaran non tunai dalam anggaran belanja daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, instansi terkait juga bertanggung jawab atas terselenggaranya penyelenggaraan keuangan daerah menurut tata kelola keuangan pemerintah yang baik yakni transparan, bertanggung jawab, serta berdasarkan landasan hukum (*rule of law*)[11][12] melalui pelaporan keuangan, sebab dapat mengungkapkan posisi keuangan serta efisiensi kinerja pemerintah dalam memenuhi harapan masyarakat dan pelayanan publik. Tata pemerintahan yang baik (*Good governance*) dapat diartikan sebagai asas pemerintahan yang memungkinkan efisiensi pelayanan publik, keadilan sistem hukum dan akuntabilitas pelaksanaan kepada publik.[13] dalam UU Keuangan Negara No. 17 Tahun 2003 dan UU Perbendaharaan Negara No. 1 Tahun 2004, yang mengatur tentang pentingnya tata kelola keuangan yang baik (*Good Governance*).[14]

Sementara beberapa penelitian tentang pengelolaan keuangan telah dilakukan oleh [11], [3], [14], [12], [1], [2], [15], [7]. Secara umum obyek penelitian yang diteliti yaitu pemakaian program transaksi nontunai dan permasalahan yang berkaitan dengan pemakaian program transaksi nontunai dalam pengisian APBD. Berkaitan terhadap riset peneliti, terdapat kesamaan dan perbedaan. Kemiripannya yakni sama-sama meneliti kegiatan transaksi pada pelaksanaan APBD melalui program transaksi nontunai di daerah sesuai fokus yang telah ditetapkan di daerah.[16]

Keterbaruan dari penelitian ini adalah pertama penelitian ini dilakukan di beberapa wilayah kecamatan sedangkan penelitian terdahulu hanya dilakukan di satu wilayah, kedua yakni tidak optimalnya transaksi non tunai di beberapa kecamatan di Sidoarjo terhadap keseluruhan transaksi yang terkait dengan APBD. Sehingga, hasil riset ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam penggunaan APBD agar dapat berjalan secara efektif dan lebih baik.

Pemilihan objek penelitian memiliki alasan yakni beberapa kecamatan yang disebutkan diatas sudah menerapkan transaksi non tunai pada pelaksanaan anggaran daerah dan juga peneliti mengambil objek tersebut dengan kriteria kecamatan bagian kota dan bagian pinggiran agar dapat memenuhi tujuan yang diambil oleh peneliti. Peneliti juga memiliki beberapa tujuan yakni pertama untuk mengetahui Bagaimana proses implementasi transaksi non tunai pada pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja daerah, kedua untuk mengetahui Apa saja kendala yang dihadapi saat Penerapan sistem transaksi nontunai. Oleh karena itu, berdasarkan Latar Belakang dan tujuan diatas peneliti tertarik untuk mengambil judul Evaluasi Penerapan Transaksi Non tunai Pada Pengelolaan Keuangan Di Kecamatan Wilayah Sidoarjo.

Metode Penelitian

Penelitian ini berjenis kualitatif interpretatif dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan agar penelitian ini lebih menekankan peneliti untuk terlibat secara langsung serta mendalam dalam kasus yang dijadikan sebagai objek studinya untuk mengungkap suatu fenomena yang diperoleh di lapangan[17]. Pendekatan studi kasus yang digunakan pada penelitian ini karena peneliti dapat melakukan penelitian secara mendalam mengenai suatu program, peristiwa, serta aktivitas, baik pada perorangan, sekelompok orang, lembaga maupun organisasi dengan tujuan mendapatkan pengetahuan mendalam mengenai fenomena yang ingin diketahui[18]. [19]Penelitian kualitatif sendiri yakni metode yang bertujuan dalam mengetahui pengalaman subjek, seperti tindakan, pemikiran, serta dorongan. Penelitian ini berlokasi pada beberapa Kecamatan Yang ada di wilayah Sidoarjo Yakni Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Jabon, Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Porong, dan Kecamatan Candi. Periode penelitian dilaksanakan pada bulan 1 Februari 2023 – 31 Maret 2023. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh langsung dari objek penelitian di beberapa Kecamatan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni :

1. Wawancara

Wawancara menurut[20] adalah dua orang yang saling bertemu untuk menggali informasi hingga bertukar pemikiran melalui tanya jawab dengan tujuan mendapatkan makna dalam suatu topik yang sedang dilakukan penelitian.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Wawancara tidak terstruktur, yakni dilakukan secara formal dengan menyusun pedoman wawancara menggunakan pedoman wawancara dengan wawancara tidak terstruktur berarti peneliti harus memahami apa yang akan ditanyakan informan.[21]
 - b. Wawancara terstruktur, yakni wawancara dilakukan secara formal dengan menyusun pedoman wawancara sebelumnya, wawancara yang dilakukan juga tidak boleh keluar dari tema penelitian yang sebelumnya sudah dibuat. Apabila peneliti melakukan wawancara pada informan maka pertanyaan yang akan ditanyakan harus sama dengan informan sebelumnya karena hal ini termasuk dalam wawancara terstruktur.[21]
Peneliti akan melakukan wawancara pada bagian perencanaan dan keuangan dalam kecamatan yang termasuk dalam objek peneliti.
2. Observasi
Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung lokasi yang akan dijadikan lokasi penelitian kemudian mengamati serta mendalami apa yang terjadi pada objek penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi terstruktur, yakni observasi dengan cara mendatangi langsung serta menyampaikan niat dan tujuannya terkait dengan objek penelitian yang dituju. Peneliti akan mendatangi kantor-kantor kecamatan yang termasuk dalam objek peneliti yang kemudian akan menyampaikan bahwasanya akan melakukan observasi terstruktur.
3. Dokumentasi
Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data mengenai teori-teori atau dokumen-dokumen yang terkait dengan proses penerapan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan di Kecamatan Sidoarjo. Seperti foto, video, fotocopy dan scan dokumen yang didapatkan saat proses pengumpulan data dilakukan[19][15].

Informan Penelitian

Informan penelitian adalah seseorang diluar dari peneliti yang menguasai mengenai tema pada penelitian. Jumlah informan pada penelitian kualitatif biasanya disesuaikan dengan setting serta kebutuhan data yang diperlukan. Dari informan penelitian ini sebuah penelitian dapat menentukan kualitas penelitian karena jawaban dan pendapat yang diberikan adalah data yang sangat diperlukan. Berikut adalah informan penelitian yang ditetapkan oleh peneliti :

Tabel 1 Informan

No.	Nama Informan	Keterangan
1	R	Kasubag perencanaan & keuangan Kec. Sidoarjo
2	Y	Bendahara Keuangan Kec. Candi
3	L	Admin keuangan Kec. Porong
4	RN	Bendahara keuangan Kec. Tanggulangin
5	EML	Bendahara perencanaan & keuangan Kec. Jabon

Dari informan penelitian diatas yang menjadi informan kunci pada penelitian kali ini yaitu: ketua subbagian perencanaan dan keuangan.

Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu proses pencarian dan pengumpulan informasi dengan tersistem atas interview, pengamatan, serta pendokumentasian dengan mengorganisasi datanya pada sejumlah kategori, menggambarkannya kepada sejumlah unit, mensintesiskan, menggabungkannya kepada sejumlah pola, memutuskan hal yang terpenting untuk menarik kesimpulan agar dapat dimengerti dengan baik untuk diri sendiri maupun orang lain[22]. Menurut Miles dan Hubberman[20] teknik analisis datanya menggunakan analisis kualitatif yang akan mengumpulkan, mereduksi, menyajikan, serta menarik kesimpulan.

Proses yang dilakukan yaitu:

- a. Reduksi data
Didefinisikan sebagai tahap seleksi yang menitikberatkan dalam penyederhanaan, abstraksi, serta berbagai perubahan informasi yang dihasilkan melalui tulisan-tulisan yang tercatat dilokasi kejadian. Ada tiga tahapan dalam reduksi data. Yaitu, (1) pengeditan data, pengelompokan, serta peringkasan. (2) Peneliti membuat tulisan berupa catatan tentang tahap penelitian sehingga bisa mengidentifikasi topik, kelompok, sertabentuk informasi. (3) Penulis membuat gagasan dan deskripsi topik terkait, sampel, atau kelompok data terkait.
- b. Penyajian data
Penyajian data mencakup urutan untuk mengatur informasi. Yaitu dengan membuat kelompok informasi menjadi satu dan membagi kelompok informasi lainnya sehingga data akan terbentuk dengan tersistem dan gampang dimengerti.
- c. Penarikan kesimpulan
Dalam uji kesimpulan, penulis menerapkan strategi induktif yang memperhitungkan hasil dalam

mereduksi data yang tersedia dan akan berfokus pada permusan masalah maupun tujuannya. Peneliti selanjutnya membandingkan data yang sudah dirancang agar bisa mendukung hasil penelitian ini dengan menjelaskan kesimpulan secara jelas sehingga akan menjadi respon atas masalah yang tersedia.[23]

Keabsahan Data

Bukan hanya reduksi data yang dilakukan oleh peneliti dalam mengecek keabsahan data triangulasi juga merupakan hal yang harus dilakukan pada penelitian ini. Triangulasi adalah proses mengkonfirmasi data yang memanfaatkan sesuatu lain dalam membandingkan hasil wawancara pada wawancara terhadap objek penelitian [24]. Dalam triangulasi ini peneliti menggunakan triangulasi sumber sebagai keabsahan data yakni mengkonfirmasi data yang sudah didapatkan pada sumber yang tidak sama. Triangulasi sumber yaitu menguji data dengan cara mengecek data yang sudah diperoleh dari sumber informan yang berbeda[25]. Hal ini berarti setelah peneliti melakukan wawancara dari informan yang berbeda kemudian langkah selanjutnya ialah data tersebut kemudian dideskripsikan, lalu di kategorikan mulai dari yang memiliki pandangan sama, yang berbeda, serta yang spesifik hingga kemudian dapat ditarik kesimpulan dari data yang telah dianalisis tersebut untuk dibandingkan data dari hasil wawancara setiap informan untuk mengkaji lebih dalam[26].

Hasil dan Pembahasan

Penerapan Transaksi Nontunai di Kecamatan Wilayah Sidoarjo

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan kecamatan Sidoarjo, menjelaskan bahwa melaksanakan dan pengelolaan anggaran belanja APBD kecamatan wilayah Sidoarjo menggunakan sistem transaksi nontunai sejak Tahun Anggaran 2018. Sesuai Perbup No. 9 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perbup No. 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembayaran non tunai dalam Anggaran Belanja Daerah. kecamatan di wilayah sidoarjo telah menerapkan transaksi nontunai sesuai dengan kebijakan yang dilakukan hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [11], [3], [14], [12], [1], [2], [15], [7]. Dalam wawancara itu juga didapati bahwa Bendahara pengeluaran Kecamatan wilayah Sidoarjo memiliki rekening giro yang terintegrasi secara langsung dengan PT. Bank Jatim sebagai pengelola Rekening Kas Umum Daerah melalui aplikasi keuangan berbasis web, yaitu Sistem Informasi Keuangan Kabupaten Sidoarjo (SIKSDA). Aplikasi SIKSDA mempermudah bendahara dalam memproses pencairan dana, karena di dalam aplikasi tersebut, bendahara bisa membuat beberapa dokumen/persyaratan pencairan dana, serta bisa mencairkan anggaran secara langsung ke pihak penerima tanpa perlu berhadapan. Pencairan dana tidak hanya dilakukan menggunakan bank jatim saja melainkan dapat dicairkan menggunakan bank lain sehingga mempermudah bendahara dalam menyalurkan dana pada pihak penerima. Transaksi non tunai terdiri dari 2 (dua) metode, yaitu Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPPGU) dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS).

Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan di Kecamatan Wilayah Sidoarjo

Pengelolaan Keuangan di Kecamatan Wilayah Sidoarjo memiliki 3 anggaran belanja dalam pelaksanaan transaksi non tunai, yakni:

1. Belanja Modal
Belanja Modal merupakan anggaran untuk memperoleh aset tetap, seperti gedung, alat mesin, dan elektronik. Belanja Modal di Kecamatan meliputi : Belanja modal komputer, laptop, printer, alat rumah tangga, serta belanja modal pembangunan gedung.
2. Belanja Pegawai
Belanja Pegawai merupakan honorarium bagi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam mengelola keuangan di Kecamatan.
3. Belanja Barang atau jasa
Belanja barang atau jasa merupakan anggaran yang digunakan untuk belanja rutin kebutuhan kantor Kecamatan. Belanja barang atau jasa di Kecamatan meliputi : Belanja barang atau jasa tenaga penanganan sarana dan prasarana umum, Belanja barang atau jasa tenaga penanganan sosial, Belanja barang atau jasa tenaga administrasi, Belanja barang atau jasa perabot dan kebersihan kantor, Belanja barang atau jasa pemeliharaan pelatan dan mesin, Belanja barang atau jasa pemeliharaan bangunan gedung-tempat kerja-taman, Belanja barang atau jasa honorarium narasumber kegiatan, Belanja barang atau jasa tagihan telepon, Belanja barang atau jasa tagihan listrik, Belanja barang atau jasa alat tulis kantor, Belanja barang atau jasa bahan bakar dan pelumas kendaraan bermotor, Belanja barang atau jasa pembayaran pajak kendaraan bermotor, Belanja barang atau jasa pemeliharaan kendaraan bermotor.

Dari rincian program kerja dan anggaran di atas, akan dibuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagai panduan pelaksanaan pembayaran nontunai APBD pada tahun 2023.

Pelaksanaan dan Tata Kelola Keuangan di Kecamatan mengikuti Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan di Kecamatan pada tahun 2022 yang mengacu pada Perbup No.7 Tahun 2018 dan Perbup Sidoarjo No. 9 Tahun 2019 yang mewajibkan penggunaan pembayaran nontunai dalam pengeluaran APBD. Selain itu, juga

merujuk pada Perbup Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Proses pencairan dana nontunai dilakukan sesuai dengan Daftar Penerimaan Alokasi. Bendahara pengeluaran kecamatan mempunyai rekening giro yang terhubung secara langsung dengan PT. Bank Jatim yang bertanggung jawab atas Rekening Kas Umum Daerah melalui aplikasi keuangan berbasis web, yakni Sistem Informasi Keuangan Kabupaten Sidoarjo (SIKSDA). Ada dua opsi transaksi nontunai, yakni dengan menggunakan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPPGU) untuk menghasilkan Surat Perintah Pemindah Bukuan (SPPB), dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS) untuk mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM).

1. Langkah-langkah untuk meminta pembayaran pengganti uang persediaan (SPPGU) dilakukan dengan menggunakan Surat Perintah Pemindah Bukuan (SPPB) secara online yang telah diverifikasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan dipindahkan dari rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening Penerima. Transaksi nontunai GU dapat diproses melalui aplikasi SIKSDA. Ada dua kriteria transaksi nontunai yang dapat diproses melalui GU: Pembelanjaan di bawah Rp. 30.000.000, Pembelanjaan anggaran yang dikirimkan langsung ke satu rekening penerima, seperti pembelian langganan surat kabar dan pembelanjaan kebersihan kantor.
2. Langkah-langkah untuk mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS) melibatkan bendahara pengeluaran yang meminta pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak kerja atau surat perintah kerja lain, termasuk pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu. Dokumen SPPLS disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). LS adalah cara untuk mencairkan anggaran transaksi nontunai oleh Bendahara Umum Daerah (BUD). Dalam proses ini, BUD membuat Surat Perintah Membayar Langsung (SPMLS) melalui aplikasi Sistem Informasi Keuangan dan Aset Daerah (SIKSDA). Persyaratan pembayaran non tunai yang dapat diproses melalui LS: Nilai transaksi melebihi Rp. 30.000.000, Pembayaran yang ditransfer ke lebih dari satu rekening penerima, seperti pembayaran kepada karyawan.

Penatausahaan Pengelolaan keuangan di Kecamatan sudah sesuai dengan penerapan pembayaran nontunai. Persyaratan yang perlu dilengkapi sebagai berikut :

1. Pembayaran non tunai menggunakan cara SPPGU memiliki dokumen yang harus dilengkapi yakni : bukti Pembelian, Kwitansi Pembayaran, Fotokopi Nomor Rekening penerima, Fotokopi NPWP, Bukti pembayaran transaksi
2. Pembayaran non tunai menggunakan SPPLS. Pembayaran non tunai menggunakan cara SPPLS. Dokumen yang dilengkapi dalam proses pembayaran non tunai dengan cara SPPLS: Surat Perjanjian dengan PPKom, Surat Perintah Membayar Langsung (SPMLS), Tanda terima penerima gaji.

Penerapan Prinsip *Good Governance* pada Kecamatan wilayah Sidoarjo

Pelaksanaan pembayaran transaksi non tunai pada APBD memiliki tujuan yakni untuk mewujudkan penyelenggaraan urusan keuangan daerah yang tepat, cepat, aman, efisien, transparan serta mencegah terjadinya korupsi, maka pembayaran non tunai dalam belanja APBD ini diselenggarakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabel, efisiensi dan efektif. Efisiensi penyelenggaraan pembayaran non tunai dalam belanja APBD wajib dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya. Keamanan pelaksanaan pembayaran non-tunai dalam belanja APBD memberikan jaminan sistem keamanan kepada seluruh pihak yang berkepentingan dalam pembayaran belanja APBD. Dampak pelaksanaan pembayaran non tunai dalam belanja APBD wajib menghasilkan dampak yang besar bagi kepentingan Daerah dan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam pembayaran belanja APBD. Transparansi penyelenggaraan pembayaran non tunai Dalam Belanja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, yakni Pembayaran non tunai dalam belanja APBD dengan mencerminkan keterbukaan dalam melakukan transaksi keuangan daerah.

Manfaat dan Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Implementasi Non tunai

Berdasarkan penelitian dan pembahasan, ada beberapa manfaat yang diperoleh dalam penerapan transaksi non tunai, yakni :

1. Informasi saldo **1** *time* dan saldo bank dapat terlihat setiap hari
2. Mutasi rekening dapat dengan mudah ditelusuri
3. **Transaksi didukung dengan bukti yang sah**
4. Tidak perlu cetak bukti bayar karena sudah terlihat di sistem
5. Meminimalisir transaksi ilegal atau korupsi
6. Bendahara tidak beresiko membawa uang **tun** **1** sehingga mengurangi resiko kehilangan
7. Lebih efektif dan efisien karena lebih mudah **dan mempercepat pelaksanaan setoran/ tagihan dari rekening bendahara pengeluaran**
8. Terjamin keamanan dan kerahasiaannya

9. Meningkatkan kedisiplinan pengelolaan keuangan dalam melakukan pencatatan dengan meminimalisir kesalahan

Penerapan transaksi non tunai dalam pelaksanaan APBD sangat membantu dalam mewujudkan prinsip *Good Governance* dalam mewujudkan prinsip Akuntabilitas, Transparansi, Efektivitas, dan Efisiensi. Sesuai dalam UU no. 32 tahun 2004 yang berisi setiap prinsip dalam *Good Governance* yang diharapkan dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat serta dapat menekan tingkat korupsi pada pemerintah daerah.

1. Prinsip Akuntabilitas

Prinsip ini berarti bertanggung jawab secara akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pihak swasta terhadap pemerintah daerah yang dapat mempertanggungjawabkan semua aspek terkait dengan proses pelaksanaan pemerintahan. Dengan menggunakan transaksi non tunai, informasi saldo dan mutasi dari semua transaksi dapat dengan mudah diketahui dan didukung oleh bukti yang valid, sehingga lebih akuntabel. Pada akhir tahun anggaran, bendahara pengeluaran merasa terbantu dengan adanya transaksi nontunai ini karena laporan pertanggungjawaban dapat lebih akurat dan tepat waktu. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penerapan transaksi nontunai dapat mewujudkan prinsip *good governance*, yaitu prinsip akuntabilitas.

2. Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi yang dimaksud adalah bagaimana pengelolaan APBD lebih jelas dengan mengunakan jejak digital atau jejak bukti transfer yang tercatat di perbankan. Dengan cara ini, aliran uang dari kas daerah ke bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu, lalu ditransfer ke pihak ketiga menjadi lebih terlihat arahnya kemana dan dapat diketahui dari rekening koran bendahara pengeluaran. Oleh karena itu, ketika disampaikan ke pemeriksa seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), transparansi akan menjadi lebih baik karena adanya jejak transaksi yang sesuai dengan Buku Kas Umum (BKU) serta bukti-bukti yang ada. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan transaksi nontunai dapat mewujudkan prinsip *good governance*, yaitu prinsip transparansi.

3. Prinsip Efektifitas dan Efisien

Keefektifan berkaitan dengan akurat dalam target, penggunaan yang tepat, dan tepat waktu. Saat terjadi transaksi barang yang sampai ke tangan, proses pembayaran dapat langsung dilakukan dengan cepat melalui transfer bank Jatim. Dalam hal efisiensi transaksi tanpa tunai dapat menghemat waktu, dan jumlah dokumen yang harus dicetak sedikit. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan transaksi nontunai dapat mewujudkan prinsip *good governance*, yaitu prinsip efektifitas dan efisien.

Kendala

Dari hasil penelitian yang dilakukan ada beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem Transaksi non tunai pada APBD, yaitu :

1. Koneksi internet yang tidak stabil yang mengakibatkan ada keterlambatan dalam pelayanan
2. Downnya sistem yang terhubung dengan aplikasi SIKSDA, sering terjadi diakhir tahun karena banyaknya yang mengakses web yang sama untuk tutup buku akhir tahun.
3. Gangguan pada server bank yang mengakibatkan adanya keterlambatan dalam pencairan dana
4. Sumber Daya Manusia (SDM), jika SDM nya sudah berumur dan tidak dapat menggunakan teknologi maka akan memperlambat dalam pemrosesan data yang saat ini dilakukan secara online.

Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Kecamatan diwilayah sidoarjo sudah menggunakan transaksi nontunai pada semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan sesuai dengan perbup No. 9 tahun 2019 tentang perubahan atas perbup No. 7 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pembayaran non tunai dalam Anggaran Belanja Daerah. Penerapan transaksi nontunai ini juga memberikan banyak manfaat sehingga transaksi menjadi sangat efisien dan efektif. Manfaat penerapan transaksi non tunai yaitu informasi saldo dan informasi seluruh mutasi transaksi dapat ditelusuri sehingga lebih akuntabel, karena seluruh transaksi yang dilakukan didukung dengan bukti yang sah dan terlihat dalam sistem setiap hari sehingga lebih transparan, bendahara tidak begitu membawa uang tunai sehingga mengurangi adanya resiko kehilangan, transaksi ilegal atau penyalahgunaan. Penggunaan anggaran lebih efisien dan arus keluar masuk kas lebih terkontrol, meningkatkan kedisiplinan dalam pengelolaan keuangan, dan mempermudah bendahara dalam memproses pembayaran. Transaksi nontunai cenderung lebih efisien apabila dibandingkan dengan transaksi tunai. Karena mempercepat dan mempermudah bendahara dalam melaksanakan pelaporan setoran/ tagihan keuangan serta tutup buku akhir tahun dan terjamin keamanan dan kerahasiaannya. Namun dari penerapan transaksi nontunai tersebut masih ada kendala yang ditimbulkan karena seringnya ada gangguan dalam internet maupun sistem disaat akhir tahun karena banyaknya yang mengakses web atau aplikasi SIKSDA untuk tutup buku akhir tahun.

Saran yang bisa peneliti berikan berdasarkan dari pembahasan dan kesimpulan yakni diperlukan perbaikan atau *maintenance* lebih lanjut pada sistem yang berlaku saat ini. Baik dari sistem aplikasi SIKSDA maupun dalam

sistem yang terintegrasi pada sistem pusat agar penerapan transaksi nontunai bisa terlaksana dengan maksimal. Pemerintah juga dapat meningkatkan kerja sama dengan pihak bank Jatim maupun bank lain supaya sistem juga kinerja pelayanan meningkat dan proses transaksi dapat berjalan baik dan menimbulkan manfaat yang optimal.

Daftar Pustaka

- [1] A. Pelealu, G. B. Nangoi, And N. Y. T. Gerungai, "Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung," *Going Concern J. Ris. Akunt.*,

- Vol. 14, No. 1, Pp. 220–229, 2018, Doi: 10.32400/Gc.13.04.21018.2018.
- [2] B. F. Wijaya, S. Suhairi, And V. T. Putriana, "Evaluasi Implementasi Kebijakan Transaksi Non-Tunai Dalam Konteks Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Kasus Di Kota Solok-Sumatera Barat," *J. Ilm. Univ. Batanghari Jambi*, Vol. 21, No. 1, P. 86, 2021, Doi: 10.33087/Jiubj.V21i1.1230.
 - [3] S. Hendrawan, N. Anisah, And L. N. Nafidah, "Implementasi Transaksi Non-Tunai Sebagai Dasar Tata Kelola Pemerintah Yang Baik: Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Jombang," *Akuntabilitas*, Vol. 12, No. 2, Pp. 227–236, 2019, Doi: 10.15408/Akt.V12i2.12150.
 - [4] "Ini Celah Besar Untuk Korupsi Dalam Apbn 2018 | Republika Online." <https://news.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/03/22/P5yu18377-Ini-Celah-Besar-Untuk-Korupsi-Dalam-Apbn-2018> (Accessed Feb. 21, 2023).
 - [5] V. Azkiya, "Icw: Kasus Korupsi Terbanyak Terjadi Di Sektor Anggaran Dana Desa Pada 2021," 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/19/icw-kasus-korupsi-terbanyak-terjadi-di-sektor-anggaran-dana-desa-pada-2021>
 - [6] A. Lintang Yudhanti And P. Sistem Transaksi Non, "Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Terhadap Akuntabilitas Kinerja Manajerial," *Behav. Account. J.*, Vol. 1, No. 2, Pp. 132–146, Dec. 2018, Doi: 10.33005/Baj.V1i2.26.
 - [7] L. L. Aprilia, "Analisis Implementasi Sistem Transaksi Non Tunai Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul," 2021.
 - [8] R. S. Arinda, "Evaluasi Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Pada Belanja Modal Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo," 2022.
 - [9] "Diduga Korupsi Dana Desa Rp 174 Juta, Mantan Kades Di Sidoarjo Ditahan Polisi Halaman All - Kompas.Com." <https://regional.kompas.com/read/2021/10/01/151255378/Diduga-Korupsi-Dana-Desa-Rp-174-Juta-Mantan-Kades-Di-Sidoarjo-Ditahan?Page=All> (Accessed Feb. 21, 2023).
 - [10] F. D. Rohmah Lailatur, "Analisis Penerapan Asas Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Di Kelurahan Pucang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo," *Ilmu Sos.*, Vol. 1, P. 14, 2022.
 - [11] R. A. . K. D. C. R. Mongisidi Elsie Celvia, "Analisis Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado," *Pembang. Ekon. Dan Keuang. Drh.*, Vol. 20, P. 16, 2019.
 - [12] L. D. Kurnia, "Analisis Efisiensi Penerapan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kota Metro Provinsi Lampung," *Deriv. J. Manaj.*, Vol. 14, No. 1, 2020, Doi: 10.24127/Jm.V14i1.439.
 - [13] M. S. Prof Dr. H. Muhammad Ramli, *Manajemen Pelayanan Publik*. 2008. [Online]. Available: http://repositori.uin-alauddin.ac.id/7472/1/Buku_Manajemen_Pelayanan_Publik.Pdf
 - [14] M. S. Selly Septiani, Endah Kusumastuti, Sst., "Penerapan Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Prinsip Good Governance (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat) Selly," *Pros. Ind. Res. Work. Natl. Semin.*, Vol. 10, No. 1, Pp. 1171–1181, 2019, [Online]. Available: <https://jurnal.polban.ac.id/proceeding/article/view/1478>
 - [15] K. A. D. P. N. Dartawan And I. K. Sudiarta, "Implementasi Transaksi Non Tunai Di Sekretariat Dprd Provinsi Bali Untuk Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)," *Kertha Negara J. Ilmu Huk.*, No. 7, Pp. 1–14, 2019, [Online]. Available: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/view/52624>
 - [16] Y. Kristina, "Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Daerah Melalui Sistem Transaksi Non Tunai Guna Mencapai Good Governance Di Kota Palangkaraya," 2022, Doi: <http://eprints.ipdn.ac.id/8555/>.
 - [17] W. Lawrence Neuman, "Social Research Methods: Qualitative And Quantitative Approaches W. Lawrence Neuman Seventh Edition," 2014, Accessed: Feb. 15, 2023. [Online]. Available: www.pearsoned.co.uk
 - [18] M. Rahardjo, "Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya," 2017.
 - [19] L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 2018. Doi: <https://opac.perpusnas.go.id/detailopac.aspx?id=1133305#>.
 - [20] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. 2014. Doi: <https://opac.perpusnas.go.id/detailopac.aspx?id=911046#>.
 - [21] S. Hermawan And A. Amirullah, "Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif," Mar. 2016.
 - [22] H. R. Dona And A. Khaidir, "Implementasi Pengelolaan Keuangan Dengan Transaksi Non Tunai Di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat," *J. Manaj. Dan Ilmu Adm. Publik*, Vol. 1, No. 1, Pp. 56–70, 2019, Doi: 10.24036/Jmiap.V1i1.5.
 - [23] "Kulik Teknik Analisis Data Kualitatif Berdasarkan Pendapat A..." <https://www.dqlab.id/kulik-teknik-analisis-data-kualitatif-berdasarkan-pendapat-ahli> (Accessed Jan. 25, 2023).
 - [24] M. Rahardjo, "Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif," 2010.
 - [25] "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D / Sugiyono | Opac Perpustakaan Nasional Ri."

- <https://opac.perpusnas.go.id/detailopac.aspx?id=911046> (Accessed Feb. 21, 2023).
- [26] S. Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial, A. Alfansyur, And R. Artikel, "Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial," *Hist. J. Kajian, Penelit. Dan Pengemb. Pendidik. Sej.*, Vol. 5, No. 2, Pp. 146–150, Dec. 2020, Doi: 10.31764/Historis.V5i2.3432.
- [27] "Mengenal Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Lebih Dekat (Bagian 1)[1] 'Mengenal Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Lebih Dekat (Bagian 1).'
<https://bpkad.kuningankab.go.id/detail/mengenal-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-apbd-l>."
<https://bpkad.kuningankab.go.id/detail/mengenal-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-apbd-lebih-dekat-bagian-1> (Accessed Mar. 17, 2023).

ORIGINALITY REPORT

12%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnal.polban.ac.id Internet Source	4%
2	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	2%
3	bajangjournal.com Internet Source	2%
4	fe.ummetro.ac.id Internet Source	1%
5	Submitted to Politeknik Negeri Bandung Student Paper	1%
6	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	1%
7	databoks.katadata.co.id Internet Source	1%
8	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	1%
9	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On